





## III. RENCANA STRATEGIS

Sebagai suatu instansi, pemerintah Kota Kendari mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan (**Poldas**) dan Program Pembangunan Daerah (**Propeda**), yang merupakan aspirasi dan komitmen seluruh *stakeholders* pembangunan Kota Kendari.

### 3.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi terhadap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi. Oleh sebab itu kemampuan dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada setiap daerah akan merupakan faktor kunci sukses dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kota Kendari merupakan salah satu daerah yang harus berbenah diri guna penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut dan juga tuntutan perkembangan saat ini. Ada beberapa tuntutan masyarakat yang mengemuka antara lain :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Terwujudnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam (SDA) secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini.
3. Mewujudkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional.



4. Kemampuan merumuskan pilihan berdasarkan prioritas, tujuan (alternatif) dan sasaran, menemukan kendali permasalahan dan merumuskan tujuan serta menetapkan sasaran secara tepat dalam mengembangkannya.

Untuk merespon tuntutan masyarakat tersebut di atas maka diperlukan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan mengintegrasikan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

### **3.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI**

#### **A. Visi**

Menyikapi tuntutan tetap tegaknya semangat reformasi, maka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kota Kendari dilaksanakan dengan bertumpu pada prinsip-prinsip demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pendekatan pengelolaan yang strategis antara permasalahan internal dan tantangan eksternal bagi Kota Kendari, diperlukan suatu cara pandang bersama para pengelola kebijaksanaan maupun pelaku pembangunan Kota (*stakeholders*) bagi masa depan Kota Kendari, dalam suatu Visi, Misi dan Strategi (Vimistra) Pembangunan Kota Kendari.

Berdasarkan kondisi umum yaitu dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan Kota maupun faktor-faktor



eksternal yang berkaitan dengan berbagai kondisi regional maupun global, maka Visi Kota Kendari disepakati sebagai berikut :

## **“Mewujudkan Kendari Tahun 2020 Sebagai Kota Dalam Taman yang Bertaqwa, Maju, Demokratis dan Sejahtera”**

Sedangkan Visi Walikota dan Walikota terpilih Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musaddar Mappasomba, SP, MP adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kota Kendari yang Berakhlak, Adil, Demokratis, Maju dan Sejahtera”*.

Orientasi visi Kota Kendari merupakan perpaduan antara paradigma pembangunan kota yang berkelanjutan, dimana terjadi keselarasan antara *alam, manusia dan kebudayaan* dengan kebanggaan dan harapan masyarakat Kota Kendari. *Kota Berakhlak* adalah fokus dari Kota **BERTAKWA**, *Kota Bertaqwa*, adalah merupakan harapan utama yang dituju dalam pembangunan yang menggambarkan secara menyeluruh kondisi kehidupan masyarakat Kota Kendari yang agamis, patuh dan taat menjalankan perintah serta menjauhi larangannya menurut agama serta kepercayaannya masing-masing.

*Kota Yang Maju*, adalah harapan bahwa Kota Kendari harus dapat berkembang dan sejajar dengan kota-kota lainnya. Dalam aspek sosial-budaya dicirikan sebagai masyarakat yang terbuka dan partisipatif; ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai, keterjangkauan informasi dan transportasi; serta sistem pelayanan yang cepat, murah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Kota Yang Adil dan Demokratis*, adalah ekspresi kesetaraan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola pembangunan kota. Dengan kata lain pengelolaan pembangunan kota hendaknya merupakan produk keputusan dari partisipasi yang setara oleh seluruh komponen masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi.

*Kota Yang Sejahtera*, merupakan kondisi akhir yang dituju, yang menggambarkan secara menyeluruh kondisi kehidupan masyarakat Kota Kendari baik lahir maupun batin. Kota yang sejahtera adalah kota yang



berkelanjutan dalam suasana alam yang sejuk, indah dan sehat serta suasana kehidupan masyarakat yang aman, rukun, harmonis, makmur dan berkeadilan.

“Kota dalam taman, adalah ungkapan yang merefleksikan sekaligus mengabadikan kebanggaan, potensi dan kekhasan Kota Kendari, yakni “hutan dan teluk” yang laksana “sabuk hijau” (*green belt*) melingkari Kota Kendari. Eksistensi “sabuk hijau” tersebut bukan saja menjadi jati diri kota, tetapi sekaligus memiliki fungsi-fungsi yang integratif (satu kesatuan), yang secara fisik maupun sosial ekonomi memberikan jaminan keberlanjutan (*sustainable*) Kota Kendari.

## **B. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kota Kendari sebagaimana diuraikan di atas perlu ditetapkan langkah-langkah yang lebih konkrit sebagai penjabarannya. Berdasarkan makna dari kata-kata yang membentuk visi, maka ditetapkan misi yang harus di emban meliputi :

### **1. Misi lingkungan**

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas, keseimbangan dan keserasian lingkungan kota yang indah, sejuk, sehat dan lestari.

### **2. Misi Sosial kemasyarakatan**

Mendukung penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang agamis, aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.

### **3. Misi Pelayanan**

Mengembangkan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, dan transparan, terjangkau (layak harga), mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

### **4. Misi Perekonomian**

Mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi sesuai potensi daerah.



#### **5. Misi Profesionalisme Aparat**

Mengembangkan kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan.

#### **6. Misi Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokrasi, berwibawa dan bertanggung jawab.

### **3.3 TUJUAN DAN STRATEGI**

#### **A. Issu Pokok Pembangunan**

Sebelum melangkah terlalu jauh untuk merumuskan tujuan dan strategi kebijakan pembangunan, maka terlebih dahulu harus dipahami beberapa isu pokok pembangunan di Kota Kendari. Isu-isu pokok tersebut di antaranya adalah :

##### **1. Terbatasnya prasarana dasar perkotaan**

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tahun 2000 – 2010 disebutkan bahwa Kota Kendari berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota (PWK) di wilayah Sulawesi Tenggara, sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, pusat kegiatan perekonomian dan pintu gerbang perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pariwisata. Hingga saat ini secara signifikan baru dapat melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pusat pemerintahan (Ibukota) Propinsi Sulawesi Tenggara dan sebagai pusat pendidikan.

Sementara itu, berdasarkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari diarahkan sebagai pusat kota orde pertama, yakni menempati posisi paling tinggi dalam hirarki kota-kota di Sulawesi Tenggara, dengan dasar pengembangan “Kota Dalam Taman” sebagai wujud integrasi pertimbangan lingkungan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Kesenjangan antara harapan fungsi Kota Kendari dan kondisi aktualnya, salah satunya disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana perkotaan. Ke depan diharapkan penataan sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan agar masyarakat Kota Kendari semakin memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka.



## 2. Kerusakan Lingkungan

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup selalu menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menjaga eksistensinya sebagai citra ibukota, untuk itu perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup, namun beberapa permasalahan pokok yang terjadi adalah adanya kerusakan lingkungan antara lain :

- a. Teluk Kendari yang menjadi penciri (*land mark*) kota terus mengalami pendangkalan akibat erosi serta tingkat pencemaran akibat limbah industri dan limbah rumah tangga dimana pembuangannya langsung mengarah ke Teluk Kendari.
- b. Terjadinya penggundulan Hutan Nipa-Nipa dan Hutan Nanga-Nanga akibat perambah hutan semakin memperparah tingkat erosi dan pencemaran.
- c. Adanya masyarakat yang membangun dengan cara membongkar gunung sebagai material timbunan.
- d. Rendahnya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kurangnya kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Kendari Kota yang bersih, indah dan tertib; hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sampah disaluran drainase dan sungai yang ada dalam wilayah kota, dimana sungai-sungai ini bermuara langsung ke teluk kendari.
- f. Terdapat sebuah sungai besar yang bermuara di Teluk Kendari yakni sungai Wanggu, dimana sungai ini pada saat banjir membawa sedimentasi cukup besar karena aliran sungai ini melintasi dua wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, sehingga dalam penanganan DAS Wanggu perlu koordinasi lintas wilayah.
- g. Kurang efektifnya program pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- h. Kurangnya program-program yang signifikan untuk mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kelestarian lingkungan hidup.



### 3. Rendahnya Derajat Kesehatan

Permasalahan kualitas kesehatan masyarakat Kota Kendari untuk beberapa indikator masih membutuhkan penanganan yang optimal diantaranya :

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kendari lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana AKB tahun 2003 adalah 5 per 1000 kelahiran hidup. Sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 terus mengalami penurunan hingga 3 per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2007 mengalami peningkatan hingga mencapai 8 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah bayi meninggal di Kota Kendari sepanjang tahun 2007 mencapai 36 bayi dari total 4.567 bayi lahir hidup atau (8 per 1000 kelahiran hidup). Dari bayi meninggal terdiri atas 21 bayi lahir mati dan 15 kematian neonatal. Faktor penyebab terjadinya kematian bayi meliputi tetanus neonatorum, BBLR serta faktor penyebab lainnya.
- b. Demikian halnya untuk Angka Kematian Ibu (AKI) (*Maternal Mortality Rate*), di Kota Kendari setiap tahunnya mengalami fluktuasi, diaman tahun 2006 tidak terdapat kasus kematian ibu *material* (zero insiden) akan tetapi pada tahun 2007 terjadi 3 kasus kematian ibu *maternal* diantaranya adalah terlambatnya pasien dan keluarganya mengambil keputusan untuk segera ketempat pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan tewrlambatnya mendapatkan rujukan pada tingkat pelayanan yang lebih mampu dalam memberikan pertolongan persalinan, disamping itu adanya penyakit penyerta yang memburuk fase kahamilannya (penyakit jantung, paru, ginjal dan hepatitis).
- c. Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2007 di Kota Kendari tidak ditemukan kasus kematian Balita dari julah 28.744 Balita, yang bila dibandingkan tahun 2006 ditemukan 14 kasus kematian balita dari jumlah 25.066 anak balita. Hal tersebut kemungkinan disebabkan tidak terlapor/terdeteksinya oleh petugas kesehatan. Disamping itu juga tidak terlepas pula peran masyarakat kader posyandu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan.
- d. Angka kesakitan beberapa penyakit menjadi ukuran masalah kesehatan di Kota Kendari. Berdasarkan 20 besar jenis penyakit masyarakat di Kota Kendari dapat diketahui melalui laporan kesakitan terdapat 137.434 kunjungan dari kunjungan tersebut terdiri atas penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan



- bagian atas 20,59 persen, kemudian penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas 15,03 persen dan penyakit diare 6,65 persen sedangkan penyakit Susp Typhoid menempati urutan kedua puluh 2,10 persen.
- e. Pola penyakit menular adalah angka kejadian DBD tahun 2007 tercatat 665 kasus secara keseluruhan tertangani dengan baik walaupun dari jumlah tersebut menyebabkan 6 penderita meninggal dunia. Dengan kejadian Attack Rate (AR) 0,08 % dan Case Fatality Rate (CFR) 0,9 %,.
  - f. Kasus HIV / AIDS di Kota Kendari sampai saat ini belum diketahui secara pasti karena belum dilaksanakannya zero survey pada daerah-daerah yang beresiko tinggi. Namun berdasarkan data UTDD PMI Sultra terdapat 2 (dua) penderita HIV/AIDS dengan status reaktif dan skrining kantong darah, dari jumlah sampel darah diperiksa 4497 sampel. Selain penyakit menular yang juga perlu diwaspadai yaitu timbulnya atau masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan menimbulkan korban seperti Ebola dan Radang Otak. Disamping itu beberapa penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup juga memperlihatkan kecenderungan meningkat. Masalah kesehatan remaja yang makin menonjol seperti penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) perlu mendapat perhatian;
  - g. Cakupan layanan air minum di Kota Kendari dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 jumlah kepala keluarga (KK) di Kota Kendari sebanyak 56.118 KK yang mendapatkan akses air bersih di Kota mencapai 25.745 terdiri dari PDAM sebanyak 18.241 (70,85%), SPT sebanyak 2.706 (10,51%) dan SGL sebanyak 4.798 (18,64); berarti jika dibandingkan dengan jumlah Penduduk pada tahun 2007 sebesar 251.477 jiwa. Target millenium development goals (MDGS) keluarga yang terlayani jaringan terhadap Air minum adalah 80 %;
  - h. Cakupan jamban keluarga di Kota Kendari untuk tahun 2001 adalah 73 %, pada tahun 2002, 74 % sedangkan tahun 2003, 75 %. Dilihat dari data per tahunnya cakupan jamban keluarga terus mengalami peningkatan, sebab target nasional pada tahun 2010 sebesar 75 % untuk daerah perkotaan telah terpenuhi;



- i. Dari segi kelembagaan dan pelayanan kesehatan pada tahun 2007 di Kota Kendari terdapat 3 rumah sakit pemerintah yakni Rs Umum Prop. Sultra, Rs Jiwa dan Rs Abunawas Kota Kendari. Sedangkan rumah sakit Militer/Polri terdapat 2 buah yakni Rs Dr. Ismoyo dan Rs Bhayangkara. Disamping itu terdapat pula 4 Rumah sakit swasta lainnya yaitu: RS Griya Husada Bakti, Rs Santa Anna, Rs Ibnu Sina dan Rs PMI. Rumah sakit bersalin yang ada di Kota Kendari sebanyak 3 buah yaitu: Rs. Kasih Ibu, Rs. Permata Bunda dan Rs. Dewi Sartika, diakui bahwa ketersediaan dokter spesialis, masih menjadi kendala peningkatan optimalitas pelayanan rumah sakit; dan
- j. Keberadaan Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling di Kota Kendari juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2007 terdapat 11 Puskesmas 4 puskesmas perawatan dan 7 puskesmas non perawatan ditambah 21 unit puskesmas pembantu serta di tunjang 188 buah pos yandu. Selain itu terdapat 11 buah puskesmas keliling roda 4 dan 112 puskesmas keliling roda 2 dan 6 Bakesra yang dalam tahap pembentukan. Puskesmas Pembantu yang ada sebanyak 16 buah dan 160 Pos yandu. Namun demikian persebaran jumlah sarana tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan di setiap jenjang yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor penting untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan adalah ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai dalam menentukan keberhasilan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan.

#### **4. Belum Optimalnya Penanganan Pendidikan Dasar dan Menengah**

Mengawali orde otonomi daerah, pendidikan di daerah termasuk Kota Kendari menghadapi tiga tantangan besar, yakni : (1) sebagai akibat krisis ekonomi yang belum pulih, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global; (3) dengan semangat otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian sistem pendidikan sehingga dapat



mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Masalah pendidikan dasar dan menengah di Kota Kendari tidak berbeda jauh dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemerataan memperoleh pendidikan dimana angka partisipasi sekolah penduduk Kota Kendari tahun 2007 pada usia 7-12 tahun sebesar 28.961 atau 92,90% dan pada usia 13-15 tahun sebesar 15.404 atau 91,05%, dan pada usia 16-18 tahun sebesar 17.764 atau 89,05 %;
- b. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dimana masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah kecamatan, antar kelurahan, antar tingkat pendapatan penduduk dan gender; dan
- c. Kemudian kondisi umum kualitas pendidikan di Indonesia yang masih memprihatinkan juga menjadi kondisi pendidikan di Kota Kendari. Hal tersebut tercermin antara lain dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke 39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke 40 dari 42 negara peserta. Namun demikian pada tahun 2004 kita cukup bangga atas prestasi yang dapat diukir oleh beberapa siswa SMU atas keberhasilannya mendapat hadiah nobel junior fisika internasional dan pada tahun 2007 juara olimpiade matematika.



## 5. Kerawanan, Keamanan Dan Ketertiban

Meskipun pada beberapa tahun terakhir, Kota Kendari masih tergolong klasifikasi daerah 'aman', dilihat dari aspek konflik sosial, khususnya sosial, agama, ras dan antar golongan, namun implikasi eskalasi konflik dapat menjadi potensi ancaman, apalagi Kota Kendari merupakan salah satu penerima korban konflik (eksodus).

Disamping itu, potensi konflik internal juga masih eksis, diantaranya masalah kebijaksanaan alokasi sumberdaya ekonomi, yang dianggap berpihak dan tidak menguntungkan bagi kelompok tertentu. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan sebagainya, hingga masalah-masalah kekurangtertiban pada penggunaan fasilitas publik. Secara umum, potensi yang dapat menimbulkan kerawanan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kendari adalah:

- a. masih dirasakan belum konsistennya penegakkan hukum/peraturan daerah secara adil di masyarakat, yang ditandai masih belum transparannya kebijaksanaan alokasi sumber-sumber hidup masyarakat seperti proses tender, penerimaan pegawai dan pelayanan sosial;
- b. masih ada kesan '*pilih kasih*' dalam penegakkan peraturan, dikhawatirkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, yang akan berujung pada kecenderungan penghakiman massa dan konflik horisontal; dan
- c. berkaitan dengan masalah ketertiban; masih rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap penggunaan fasilitas- fasilitas publik seperti:
  - Kesadaran dalam menciptakan suasana aman dan tertib di pasar
  - Kesadaran penertiban bangunan
  - Penggunaan angkutan umum
  - Pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan
  - Masih rendahnya atau kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan suasana tertib dilingkungannya.

## 6. Lemahnya Penegakan Hukum

Aspek penegakkan hukum dan Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar utama bagi pelaksanaan pembangunan.



Pemerintah Kota Kendari dalam aspek ini masih mengalami beberapa kelemahan utamanya:

- a. Beberapa Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang dibuat dimasa lalu tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat banyak karena masyarakat tidak berperan serta dalam proses pembentukannya;
- b. Kurangnya tenaga sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas.
- c. Masih adanya beberapa peraturan daerah, yang penerapannya belum konsisten, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum;
- d. Melemahnya Supremasi Hukum yang disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum secara umum, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan Peraturan Daerah.
- e. Belum adanya/dibentuknya kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mandiri;
- f. Masih adanya pilih kasih penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah antara penyelenggara/ aparat dengan masyarakat;
- g. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami/sadar tentang hukum dan Peraturan Daerah;
- h. Belum adanya atau belum dioptimalkannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum yang didukung oleh teknologi informasi. Hal ini merupakan kendala dalam mendukung penyebaran informasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan.

## **7. Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah, Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran**

Dengan terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimplikasi terhadap kenaikan beberapa bahan pokok mengakibatkan beban hidup masyarakat semakin sulit, penurunan kinerja perekonomian nasional juga berdampak luas di daerah, salah satunya adalah semakin bertambahnya jumlah keluarga miskin. Di kota Kendari, meskipun menunjukkan indikasi keluarga miskin yang menurun, yakni pada tahun 2002 tercatat 17.087 KK atau 48,86%, kemudian menjadi 37,3% pada tahun 2003, penduduk miskin nampaknya terus semakin menurun pada



tahun 2007 penduduk miskin menjadi 33,8 persen, namun karena masih kurangnya kesempatan dan perlindungan usaha bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, maka dikhawatirkan kecenderungan penurunan tersebut bisa berubah.

Dari sisi angkatan kerja, setiap tahunnya bertambah, sementara tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Jumlah angkatan kerja di Kota Kendari tahun 2002 mencapai 48,50 % sedangkan tingkat pengangguran tercatat 14,7 % dan tingkat pengangguran ini di tahun 2004 meningkat menjadi 20,6 persen dari jumlah angkatan kerja.

Sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja seperti pertanian (primer) telah mengalami transformasi ke sektor jasa/tersier. Dalam PDRB tahun 2007 tercatat bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi menempati kontribusi tertinggi yaitu 24,52 % disusul sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 19,07 % sedangkan sektor pertanian 18,28 % yang empat tahun sebelumnya menempati urutan tertinggi sebesar 23,77 % hal ini disebabkan bahwa areal pertanian yang semakin berkurang dalam setiap tahun akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman atau peruntukan lain, adalah tantangan ke depan jika mengandalkan sektor ini sebagai sektor penggerak perekonomian kota. Disamping itu, produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Kendari selain mengalami panen yang tidak optimal juga belum diolah di Kota Kendari melainkan diperdagangkan antar pulau yakni ke Makassar dan Surabaya sehingga tenaga kerja dan nilai tambah tidak banyak yang terserap pada sektor ini. Keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, mengakibatkan masih sulitnya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, kondisi kekumuhan dan ancaman penggunaan lahan-lahan kawasan hijau kota dan kawasan konservasi oleh pemukim ilegal masih menjadi masalah penting di Kota Kendari.

#### **8. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah**

Dalam hal penataan kelembagaan, Pemkot Kendari terus berupaya mengefisienkan struktur organisasi menuju pola optimal, yang sejalan dengan



upaya-upaya peningkatan sumberdaya aparatur. Namun hingga saat ini masih ditemukan beberapa hal kelemahan sebagai berikut:

- a. Meski Pemerintah Kota telah mengacu pada pola struktur yang optimal dan efisien seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Mendagri No.57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, namun berjalan belum efektif mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada harus dapat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari sebagaimana yang diamanahkan Perda No.2 tahun 2008;
- b. Munculnya beberapa kasus-kasus penyelewengan tugas dan tanggung jawab seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) aparat, yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemda kota.
- c. Belum baku dan rutinnya mekanisme pertanggungjawaban pemerintah yang berbasis pada indikator kinerja.

## **B. Prioritas Daerah**

Berpijak pada orientasi jangka panjang pembangunan Kota Kendari, seperti yang tertuang dalam Visi, Misi dan Strategi Kebijaksanaan Kota Kendari 2020 seperti yang diuraikan diatas, yang kemudian diselaraskan dengan Visi, Misi Walikota Kendari terpilih serta Agenda Nasional dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), maka sebagai upaya penanganan issu-issu pokok yang dikemukakan sebelumnya, ditetapkan delapan prioritas daerah, sebagai berikut.

1. Kelestarian dan Keserasian lingkungan
2. Mengembangkan kapasitas Pelayanan Prasarana Dasar Perkotaan
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan
4. Memantapkan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
6. Mewujudkan Penegakkan Supremasi Hukum
7. Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah, Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran



## 8. Memantapkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Untuk memberikan fokus bagi pencapaian misi yang diemban, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dengan berpedoman pada prioritas daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2007

<b>Tujuan 1</b>	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.	
	Sasaran :	1.1 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
	Sasaran :	1.2 Meningkatkan pemanfaatan SDA dan LH melalui konservasi rehabilitasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
	Sasaran:	1.3 Meningkatkan pengelolaan SDA, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Abiotik, Biotik, Kesehatan Masyarakat dan Sosial Budaya).
Sasaran	1.4.	Terlaksananya pengendalian pengawasan pertambangan dan energi
<b>Tujuan 2</b>	Meningkatkan fungsi Kota Kendari sebagai kota pelayanan skala regional dan terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat.	
	Sasaran :	2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
	Sasaran :	2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan sistem transportasi darat dan laut.
	Sasaran :	2.3 Meningkatkan kualitas bangunan, lingkungan permukiman dan perkotaan
	Sasaran	2.4 Meningkatkan Kualitas pelayanan Perizinan, Penanaman Modal, Pertambangan dan Energi
<b>Tujuan 3</b>	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan visi Indonesia sehat 2010.	
	Sasaran :	3.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	Sasaran:	3.2 Meningkatkan kualitas SDM petugas kesehatan.
	Sasaran:	3.3 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
<b>Tujuan 4</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan dasar dan menengah serta pelestarian nilai-nilai budaya.	
	Sasaran :	4.1 Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
	Sasaran :	4.2 Meningkatkan pembinaan pendidikan luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
	Sasaran	4.3 Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan
	Sasaran:	4.4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan



	Sasaran	4.5	Lestariannya dan berkembangnya nilai-nilai Kebudayaan daerah dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri.
<b>Tujuan 5</b>	Meningkatkan rasa aman, sikap hidup yang tertib dan disiplin bagi seluruh warga masyarakat.		
	Sasaran :	5.1	Meningkatnya hubungan komunikasi yang harmonis antar umat beragama dan antar golongan
	Sasaran :	5.2	Meningkatnya sistim keamanan lingkungan yang berbasis potensi masyarakat dan aparat.
	Sasaran :	5.3	Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung keindahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
	Sasaran	5.4.	Terselenggaranya sistim administrasi kependudukan yang akurat dan terpercaya.
<b>Tujuan 6</b>	Menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) dan penegakan supremasi hukum.		
	Sasaran :	6.1	Meningkatnya kualitas SDM penyusun Perda dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah serta peraturan lainnya.
	Sasaran :	6.2	Makin berfungsinya lembaga kemasyarakatan yang mampu menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat
	Sasaran :	6.3	Meningkatnya kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.
	Sasaran :	6.4	Terselenggaranya sistem Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
	Sasaran	6.5.	Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja.
	Sasaran	6.6	Terselenggaranya sistem Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel
	Sasaran	6.7.	Meningkatnya integritas moral dan profesional aparat penegak hukum/Peratran Daerah (PPNS) untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat
<b>Tujuan 7</b>	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.		
	Sasaran :	7.1	Tersedianya areal pertanian dan hasil pertanian yang berkualitas dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kendari.
	Sasaran :	7.2	Bertambahnya kuantitas dan kualitas industri, jasa, perdagangan, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan pendapatan.
	Sasaran :	7.3	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta jaminan kesejahteraan sosial.
	Sasaran :	7.4	Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan pengembangan lembaga usaha, tenaga kerja dan konsumen.



	Sasaran	7.5.	Makin berkurangnya jumlah penduduk miskin
	Sasaran	7.6.	Tersedianya barang pokok dan barang strategi serta stabilitas harga
	Sasaran	7.7.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, ormas dan kesejahteraan keluarga
<b>Tujuan 8</b>	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah.		
	Sasaran :	8.1	Meningkatnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas DPRD.
	Sasaran :	8.2	Terbentuknya organisasi pemerintah kota yang efektif dan efisien.
	Sasaran :	8.3	Terlaksananya sistem kaderisasi dan peningkatan sumber daya aparatur serta mekanisme penjurangan karir secara obyektif, prosedural, dan prestatif.
	Sasaran :	8.4	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah di semua sektor.
	Sasaran	8.5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintahan.

### 3.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan satu tahun. Didalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Kendari merupakan akumulasi RKT dari masing-masing unit kerja se-Kota Kendari. RKT tersebut memuat informasi tentang:

1. **Sasaran** yang ingin dicapai ditahun yang bersangkutan sebagaimana yang dimuat pada dokumen Renstra.  
Dalam menetapkan sasaran RKT dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya (targetnya).
2. **Program** yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu sebagaimana yang ditetapkan.



Program yang dimaksud adalah program-program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

### 3. **Kegiatan**

Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan *indikator kinerja* dan rencana capainnya.

*Indikator kinerja* yang dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja yang dicantumkan didalam LKPJ Walikota Kendari TA 2007 meliputi: (a) **Input**, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan output; (b) **Ouput**, yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan (c) **Outcome**, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Penetapan Indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Adapun hasil identifikasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Kota Kendari Tahun 2007 dapat dilihat pada formulir **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)** pada **Lampiran 1**.